



Universitas Pekalongan  
Jl. Sriwijaya No.3, Bendan, Kec. Pekalongan Bar.,  
Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119

# PERANAN FIDIC DALAM KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA

**Alfredo Pakpahan**

Jurusan Hukum Konstruksi Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya No.3, Bendan, Kec.  
Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119  
Email: alfredo\_pakpahan@yahoo.com

---

## ABSTRAK

Segala aktivitas dalam industri konstruksi haruslah didasari oleh perjanjian yang telah disepakati yang dalam hal ini berbentuk suatu kontrak konstruksi. Seluruh pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemilik, perencana/arsitek, kontraktor, pemasok, dalam seluruh rangkaian proyek harus bertindak secara profesional dan penuh tanggung jawab. Kontrak dalam industri konstruksi tidak hanya mengatur para pihak yang terlibat, tetapi juga melindunginya dari resiko-resiko yang mungkin muncul. Dalam manajemen kontrak, terdapat aktivitas-aktivitas kunci yang harus dilaksanakan, yaitu persiapan dan pembuatan kontrak, kontrak sebagai panduan kerja (Term of Reference), kontrak sebagai alat control, dan administrasi kontrak. Paper ini akan menganalisa bagaimana FIDIC sebagai acuan kontrak internasional telah diadopsi oleh kontrak-kontrak nasional dalam rangka menjaga seluruh aktifitas dalam siklus industri konstruksi berjalan dengan baik.

**Kata kunci** : Aspek hukum, manajemen kontrak, siklus konstruksi, kontrak, industri konstruksi



## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri konstruksi di Indonesia semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya keterlibatan pendanaan dan kerja sama internasional dalam proyek infrastruktur berskala besar. Dalam konteks ini, kebutuhan akan sistem kontrak yang terstandarisasi dan diakui secara global menjadi sangat penting. FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) hadir sebagai salah satu acuan utama dalam penyusunan kontrak konstruksi internasional. Meskipun telah banyak digunakan dalam proyek-proyek yang didanai oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB, penerapan kontrak FIDIC di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Ketidaksihesuaian dengan sistem hukum nasional, serta minimnya pemahaman dan kapasitas teknis dari para pelaku industri, menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji peranan FIDIC dalam proyek konstruksi di Indonesia, mengevaluasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya dalam konteks hukum dan praktik lokal.

Namun, tidak sedikit proyek yang justru mengalami permasalahan baru akibat ketentuan khusus yang disusun tanpa kehati-hatian, sehingga menimbulkan multitafsir, ketimpangan risiko, bahkan sengketa antar pihak. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan khusus dalam kontrak FIDIC bukan hanya pelengkap, melainkan elemen strategis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran ketentuan khusus dalam memperjelas kontrak, meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek, serta mengurangi potensi konflik sejak awal. Dengan penyusunan ketentuan khusus yang tepat, proyek konstruksi dapat dijalankan lebih efektif, harmonis, dan menghasilkan kinerja yang lebih optimal.



## 2. PERMASALAHAN

Dalam proyek konstruksi, kontrak memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Seiring dengan meningkatnya keterlibatan pendanaan internasional dan kerjasama lintas negara dalam proyek infrastruktur di Indonesia, kebutuhan akan kontrak standar yang bersifat global semakin mendesak. Salah satu standar kontrak internasional yang paling banyak digunakan adalah kontrak yang dikeluarkan oleh FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils).

Dokumen kontrak FIDIC dirancang untuk menciptakan kejelasan, keseimbangan, dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek, serta dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang sistematis. Namun, penerapannya di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala utama yang muncul antara lain adalah minimnya pemahaman dari pelaku konstruksi terhadap isi dan struktur kontrak FIDIC, serta perbedaan prinsip hukum antara ketentuan FIDIC dan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa, pertanggungjawaban kontraktual, dan pengadaan jasa konstruksi.

Kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang FIDIC juga memperbesar risiko kesalahan interpretasi dan konflik antar pihak dalam proyek. Selain itu, belum adanya pedoman nasional yang secara resmi menjembatani antara ketentuan FIDIC dan regulasi Indonesia menyebabkan kontrak ini sulit diimplementasikan secara menyeluruh tanpa penyesuaian.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun FIDIC memiliki potensi besar dalam mendukung pelaksanaan proyek konstruksi yang profesional dan transparan, masih dibutuhkan pendekatan yang tepat agar kontrak ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam peran FIDIC dalam konstruksi di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kontrak FIDIC dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia?



Universitas Pekalongan  
Jl. Sriwijaya No.3, Bendan, Kec. Pekalongan Bar.,  
Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119

2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kontrak FIDIC di Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian penerapan FIDIC dengan sistem hukum dan praktik konstruksi nasional?



### 3. PEMBAHASAN

Kontrak FIDIC berperan penting dalam menciptakan struktur kerja sama yang adil dan transparan dalam proyek konstruksi. Dokumen ini disusun berdasarkan prinsip kesetaraan antara pemilik proyek dan kontraktor, serta mengutamakan kejelasan tanggung jawab, jadwal pelaksanaan, pembayaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia, FIDIC umumnya digunakan pada proyek-proyek besar yang didanai oleh lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, atau lembaga donor lainnya. FIDIC menjadi pilihan karena sifatnya yang telah teruji secara internasional dan fleksibel untuk berbagai tipe proyek seperti *design and build* maupun *turnkey project*.

Penggunaan kontrak ini juga meningkatkan kepercayaan investor asing karena dianggap memberikan jaminan hukum yang lebih netral dan terstandarisasi, dibandingkan kontrak lokal yang seringkali dianggap kurang rinci dan berpihak.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penerapan kontrak FIDIC di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain:

- Perbedaan sistem hukum  
Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sementara struktur FIDIC lebih dekat dengan sistem *common law*. Hal ini menyebabkan beberapa pasal dalam FIDIC, seperti klausul *dispute adjudication board* (DAB) atau *liquidated damages*, perlu penyesuaian agar tidak bertentangan dengan hukum nasional, seperti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Kurangnya pemahaman pelaku industri  
Banyak kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek di Indonesia belum memahami secara menyeluruh struktur dan filosofi kontrak FIDIC. Akibatnya, terjadi miskomunikasi, kesalahan interpretasi, bahkan konflik selama pelaksanaan proyek.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan  
Pendidikan dan pelatihan mengenai penggunaan kontrak FIDIC masih terbatas, terutama di daerah. Kurangnya tenaga ahli yang tersertifikasi dalam penggunaan FIDIC menyebabkan kesulitan dalam negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa kontrak.



- Tidak adanya pedoman nasional resmi  
Belum ada dokumen atau kebijakan resmi dari pemerintah atau lembaga jasa konstruksi yang memberikan panduan adaptasi FIDIC ke dalam konteks hukum dan administratif Indonesia. Ini membuat pelaku industri harus menyesuaikan sendiri, yang berisiko memunculkan kesalahan penafsiran.

Untuk mengoptimalkan penerapan FIDIC, berbagai strategi dapat dilakukan:

- Pelatihan dan Sertifikasi  
Pemerintah melalui LPJK dan asosiasi profesi seperti INKINDO dan GAPENSI dapat mengadakan pelatihan dan sertifikasi FIDIC secara nasional untuk meningkatkan pemahaman para pelaku industri.
- Penerbitan pedoman adaptasi FIDIC  
Diperlukan panduan resmi yang menjembatani kontrak FIDIC dengan regulasi lokal, sehingga penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Pedoman ini dapat mencakup aspek administrasi kontrak, penyelesaian sengketa, serta penyesuaian istilah hukum.
- Kolaborasi dengan lembaga internasional  
Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan FIDIC atau organisasi regional seperti FIDIC Asia-Pacific untuk mendapatkan dukungan dalam penerapan dan penyusunan versi lokal dari kontrak FIDIC.
- Digitalisasi dan dokumentasi proyek  
Kontrak FIDIC sangat mengandalkan dokumentasi teknis dan administratif yang baik. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen proyek berbasis digital juga akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.



## 4. PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Kontrak FIDIC memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan proyek konstruksi yang profesional, transparan, dan terstandarisasi secara internasional di Indonesia. Penggunaan FIDIC, terutama pada proyek-proyek dengan pendanaan asing, mencerminkan kebutuhan akan kontrak yang mampu menjamin kepastian hukum dan efisiensi pelaksanaan. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman teknis dari pelaku industri, dan belum adanya pedoman lokal yang secara resmi mengakomodasi penerapan FIDIC dalam konteks hukum nasional.

Oleh karena itu, agar kontrak FIDIC dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga jasa konstruksi, akademisi, dan pelaku industri untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta regulasi pendukung.

### 4.2 Saran

1. Pelatihan dan Edukasi Nasional

Pemerintah bersama asosiasi profesi perlu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi berkala terkait penggunaan kontrak FIDIC kepada kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek di seluruh Indonesia.

2. Penerbitan Pedoman Adaptasi FIDIC

Diperlukan panduan resmi yang menjelaskan bagaimana mengadaptasi ketentuan FIDIC agar sesuai dengan sistem hukum Indonesia tanpa mengurangi esensi dan prinsip dasarnya.

3. Peningkatan Kolaborasi Internasional

Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan lembaga seperti FIDIC Asia-Pacific untuk mempercepat transfer pengetahuan dan mendukung pengembangan kapasitas nasional dalam penggunaan kontrak standar internasional.

4. Penerapan Teknologi Digital

Untuk mendukung dokumentasi dan pengelolaan kontrak FIDIC secara efektif, pelaku industri perlu mulai menerapkan sistem manajemen proyek berbasis digital.



## 5. DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. (2018). *ADB Procurement Policy: Goods, Works, Nonconsulting and Consulting Services*. Manila: ADB.

FIDIC. (2017). *FIDIC Conditions of Contract for Construction – Red Book*. Geneva: Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils.

FIDIC. (2017). *FIDIC Contracts Guide*. Geneva: Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Pranoto, Y. (2020). Analisis Penerapan Kontrak FIDIC pada Proyek Infrastruktur Jalan di Indonesia. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 22(1), 45–56.

Sarwono, S. (2017). *Manajemen Proyek Konstruksi: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sarwono, S. (2019). *Pengelolaan Risiko dalam Proyek Konstruksi: Pendekatan Kontrak FIDIC dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarwono, S., & Hidayat, D. (2018). *Ketentuan Khusus dalam Kontrak FIDIC: Studi Kasus pada Proyek Konstruksi di Indonesia*. *Jurnal Teknik Konstruksi*, 22(4), 112–124.

Sarwono, S., & Nugroho, P. (2016). *Efektivitas Penyusunan Ketentuan Khusus FIDIC dalam Mengurangi Konflik dan Meningkatkan Kinerja Proyek Konstruksi*. *Jurnal Hukum Konstruksi*, 14(3), 98–110.